

Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang oleh Masyarakat bagi Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Pulau Weh/Sabang, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam

Sekilas Kota Sabang

Pulau Weh (sering juga disebut Sabang karena berada di wilayah administratif Kota Sabang), terletak di antara 95° 13' 02" dan 95° 22' 36" BT dan antara 05° 46' 28" dan 05° 54' 28" LU. Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar Indonesia (dan merupakan titik 0 kilometer Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Thailand dan India. Pulau Weh merupakan sebuah pulau atol (pulau karang) yang proses terjadinya melalui pengangkatan dari permukaan laut. Sekitar 2600 ha terumbu karang yang terdapat di Pulau Weh (terutama di sekitar Pulau Rubiah) telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh oleh Menteri Kehutanan (SK No. 928/Kpts/Um/1982 tanggal 22 Desember 1982). Kondisi demikian menjadikan Sabang terkenal sebagai tujuan wisata bahari dan memiliki potensi perikanan yang tinggi.

Perjalanan ke Sabang dapat ditempuh dengan fery kecil (dua kali sehari) selama satu jam dari Pelabuhan Ulee Lheu di Banda Aceh atau dengan fery besar dengan jadwal sekali dalam sehari. Penduduk Sabang pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani kebun. Profesi lainnya yaitu buruh, pedagang, jasa angkutan dan Pegawai Negeri Sipil.

Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004 juga menimpa Pulau Weh, namun keberadaaan palung-palung dalam di Teluk Sabang mampu mereduksi energi tsunami, disamping itu Pulau Weh dikelilingi oleh terumbu karang sehingga dampak tsunami di Sabang tidak terlalu parah. Namun demikian hempasan energi tsunami telah membuat karang-karang hancur dan banyak yang tertimbun pasir.



Green Coast Project

Wetlands International Indonesia Programme (WIIP) bersama WWF Indonesia melalui proyek Green Coast (didanai oleh Oxfam) telah memfasilitasi sekitar 31 LSM lokal dan 29 Kelompok Swadaya Masyarakat untuk membina masyarakat korban tsunami dalam melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir yang digabungkan dengan upaya-upaya penciptaan mata pencaharian alternatif di Aceh-Nias sejak Oktober 2005. Sejauh ini, pendekatan semacam ini telah memberikan hasil yang baik, karena partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi lahan (mulai dari tahap perencanaan, penyiapan dan penanaman bibit serta perawatannya) dikaitkan dengan pemberian insentif berupa pinjaman modal usaha (tanpa agunan dan tanpa bunga). Keberhasilan dalam mempertahankan hidupnya tanaman rehabilitasi (yaitu >75%) akan menjadikan pinjaman ini sepenuhnya sebagai hibah, namun sebaliknya, jika gagal mempertahankan jumlah di atas mereka diwajibkan mengembalikan modal usaha secara proporsional kepada pihak proyek. Semua prasarat (hak dan kewajiban) kelompok masyarakat untuk dapat menerima bantuan modal usaha yang dikaitkan dengan keberhasilan rehabilitasi dituangkan dalam suatu kontrak kerja yang disaksikan tokoh masyarakat.

Sampai Agustus 2008, melalui fasilitasi oleh proyek Green Coast, tercatat tidak kurang dari 1.000 hektar lahan pesisir (dari target 1.178 ha hingga akhir 2008) telah direhabilitasi (dengan jumlah tanaman hidup rata-rata sekitar 83% atau 1,54 Juta dari 1,85 juta yang ditanam) melalui penanaman mangrove dan tanaman pantai di Aceh dan Nias. Selain itu, proyek Green Coast juga telah memfasilitasi berbagai upaya perlindungan terumbu karang, khususnya di Sabang.

Di Kota Sabang, selama periode tahun 2006 s/d 2008, proyek GC telah memfasilitasi upaya-upaya pencegahan kerusakan terumbu karang; diantaranya dengan membentuk dan memberdayakan Daerah Perlindungan Laut /DPL di Kelurahan Anoi Itam, membuat pelampung penambat (*mooring buoy*) jangkar kapal di kawasan wisata Gapang Kelurahan Iboih. Disamping itu dilakukan juga upaya penanaman 50.000 mangrove di Desa Pinueng Cabeng, Kelurahan Iboih, Kecamatan Sukakarya dan 3.000 tanaman pantai di sepanjang pantai wisata Kelurahan Anoi Itam Kecamatan Sukajaya.

Tolok ukur terhadap keberhasilan kegiatan GC untuk perlindungan terumbu karang di lokasi Gapang ditinjau dari berkurangnya kerusakan terumbu karang akibat jangkar perahu, sedangkan di Anoi Itam diukur dengan adanya peningkatan terhadap perlindungan terumbu karang serta rendahnya tingkat pelanggaran memasuki zona inti DPL. Tolok ukur keberhasilan penanaman sama seperti lokasi lainnya yaitu dengan menghitung persentase tingkat keberhasilan tananaman rehabilitasi tersebut minimal mencapai 75%.

Pencapaian Kegiatan Green Coast

Kelurahan Anoi Itam Kecamatan Sukajaya

Desa Anoi Itam terletak sekitar 12km dari Kota Sabang ke arah timur. Tsunami 2004 telah menambah kehancuran terumbu karang yang sebelumnya sudah rusak akibat penangkapan ikan yang destruktif (contoh pemboman). Kondisi ini menyebabkan semakin berkurangnya pendapatan nelayan setempat. Sebenarnya sejak awal tahun 2004 (sebelum tsunami) telah ada peraturan adat yang melarang praktek destruktif fishing seperti pemboman dan penggunaan jaring muroami yaitu jaring besar dengan panjang sekitar 100m dan mata jaring (*mesh size*) yang kecil. Jaring besar tersebut ditarik oleh dua kapal sementara ada satu penyelam yang menggiring ikan ke arah jaring. Saat menggiring ikan itulah penyelam menginjak-injak karang sambil menghentak-hentakan rantai besi pada terumbu karang.

Untuk mengendalikan kerusakan terumbu karang di atas, sebuah instsitusi nelayan lokal yang dikenal dengan nama 'Panglima Laot Lhok Anoi Itam' telah melakukan pengawasan melalui patroli laut terhadap penangkapan ikan secara destruktif di Anoi Itam. Bahkan institusi ini telah menetapkan adanya suatu kawasan larangan tangkap di sekitar daerah pemijahan (*spawning ground*) dan pengasuhan (*nursery ground*) ikan.

Di Anoi Itam, proyek Green Coast telah bekerjasama dengan Pusat Gerakan dan Advokasi Rakyat (PUGAR), Panglima Laot dan Kelompok Masyarakat Udeep Saree. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh ketiga organisasi ini meliputi:

- Membentuk Daerah Perlindungan Laut/DPL seluas 20 ha dan Badan Pengelola DPL.
- Melakukan restrukturisasi dan penguatan Badan Pengelola Daerah Perlindungan Laut (BP-DPL) yang mencakup kawasan Anoi Itam dan le Meulee, termasuk melakukan kajian potensi SDA di dalamnya.
- Melaksanakan diskusi publik yang melibatkan PemKo Sabang, Majelis Adat, dan TNI-AL dalam rangka proses adopsi peraturan DPL oleh PemKo Sabang.
- Melakukan aktivitas penguatan peran dan kapasitas Panglima Laot dan Kelompok Masyarakat melalui berbagai pelatihan pengelolaan organisasi, perencanaan dan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- Menunjang fasilitas patroli Panglima Laot dengan pengadaan boat patroli.

Box Opini

"Kami biasanya memperoleh hasil tangkapan ikan sekitar Rp. 70.000/hari, tapi kemudian menurun setiap hari sejak para nelayan dari kampung seberang memakai cara-cara menangkap ikan yang merusak seperti bom, racun dan pukat. Sekarang dengan kesempatan yang ditawarkan oleh program GC ini, kami akan berusaha kuat untuk meningkatkan upaya-upaya kami dalam mengkonservasi kawasan ini demi mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan berkelanjutan"

(Ahmad, penerima bantuan dana hibah Green Coast, 2006)



DPL Anoi Itam



Melakukan penghijauan kawasan wisata dengan penanaman sekurang-kurangnya 3.000 vegetasi pantai dengan jenis cemara laut *Casuarina eusatifolia*, ketapang *Terminalia cattapa*, bunot *Callophyllum inophyllum*;

Menyalurkan bantuan modal usaha bergulir yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk usaha pertanian, warung, jualan ikan dan usaha bumbu masak. Kedepan kelompok-kelompok tersebut akan difasilitasi menjadi suatu Lembaga Keuangan Mikro;

Membangun balai serba guna baik untuk tujuan wisata maupun balai pertemuan;

Menempatkan 10 tempat sampah di lokasi wisata Lhok Anoi Itam;

Melakukan pendekatan-pendekatan terhadap Pemerintah Kota Sabang untuk mendapat pengakuan formal (berupa Surat Keputusan) yang menetapkan DPL Lhok Anoi Itam sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).

Berikut merupakan beberapa opsi pengelolaan yang ditawarkan oleh masyarakat Anoi Itam dan Panglima Laot kepada Pemerintah Kota Sabang untuk menjadikan Anoi Itam sebagai KKLD yang didasarkan pada peraturan yang berlaku di Provinsi NAD dan hasil pembelajaran di beberapa tempat KKLD di Indonesia.

Opsi-opsi Kelembagaan

Berbagai opsi bentuk kelembagaan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan Badan Pengelola KKLD, diantaranya yaitu:

1. Pengelola merupakan Panglima Laot di masing-masing Lhok atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Panglima Laot.
2. Pengelola dibentuk di masing-masing gampong berdasarkan keputusan Kheucik (kepala desa) dimana di tingkat mukim dibentuk forum koordinatif lembaga pengelola.
3. Pengelola merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, jika kawasan konservasi yang dibentuk berdasarkan SK Walikota.
4. Pengelola merupakan lembaga setingkat badan (Badan Layanan Umum) dibawah Walikota Sabang, jika kawasan konservasi yang dibentuk berdasarkan SK Walikota.
5. Alternative bentuk kawasan konservasi laut yang menjadi pilihan adalah KKL Adat (43,69 %), kemudian DPL (34,16 %) dan pilihan terakhir adalah bentuk KKLD (22,15 %).

Hasil pembelajaran yang diperoleh:

1. Terbentuknya DPL dengan batas-batas yang jelas (seluas 20 ha) telah mengurangi ancaman terhadap laju kerusakan terumbu karang di Anoi Itam. Keberhasilan ini didukung oleh masyarakat yang telah sepakat untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat mengambil organisme dari dalam DPL baik hidup maupun mati.
2. Masyarakat melaporkan bahwa ikan-ikan karang tertentu mulai kelihatan banyak dipinggiran DPL. Upaya ini menunjukkan adanya perbaikan positif kondisi keanekaragaman hayati terumbu karang di Anoi Itam.
3. Peraturan-peraturan yang dibentuk oleh masyarakat untuk melindungi terumbu karang di Anoi Itam perlu diadopsi oleh PemKot Sabang. Jika hal tersebut terwujud maka kawasan terumbu karang Anoi Itam akan mendapatkan perlindungan hukum yang akan menjamin keberadaannya dalam jangka panjang.
4. Peraturan-peraturan di atas perlu disebarluaskan kepada masyarakat luas agar memperoleh hasil yang efektif.

Kelurahan Iboih Kecamatan Sukakarya

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Iboih berprofesi sebagai nelayan dan pengusaha kecil di bidang jasa angkutan wisata bahari. Kedua kegiatan tersebut dilakukan di Selat Rubiah dan sekitarnya yang merupakan bagian dari Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh. Pada bulan-bulan tertentu, kawasan ini banyak dikunjungi/disimpangi oleh perahu-perahu pesiar (Yacht) yang berasal dari negara lain, misal Australia). Namun demikian kehadiran perahu-perahu tersebut (baik untuk kegiatan perikanan maupun pesiar), melalui jangkar yang ditambatkan pada karang telah menimbulkan kerusakan terumbu karang.

Lalu untuk mengatasi permasalahan di atas, pada tahun 2006 hingga akhir 2008, proyek Green Coast memfasilitasi sebuah LSM local (Aceh Coral Conservation/ACC) untuk melakukan suatu kegiatan yang relatif sederhana berupa pembangunan Pelampung Penambat (*mouring buoys*) di lokasi tempat berlabuhnya perahu-perahu nelayan maupun wisata. Berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan:

- Melakukan penyadaran pada penduduk sekitarnya mengenai pentingnya perlindungan terumbu karang di Taman Wisata Alam Laut Selat Rubiah;

Membuat (dan merawat) delapan unit pelampung penambat (*mouring buoys*) di lokasi Gapang untuk menambatkan jangkar;

Mensosialisasikan kepada nelayan atau wisatawan mengenai keberadaan pelampung penambat di Selat Rubiah;

Menyediakan tempat sampah di kedai-kedai wisata dan papan pengumuman tentang perlindungan terumbu karang;

Membuat papan seruan dan leaflet pelestarian terumbu karang.

Hasil pembelajaran yang diperoleh:

Meskipun kegiatan tampak sederhana, ternyata keberadaan pelampung penambat memiliki dampak positif bagi keberadaan terumbu karang serta kehidupan ikan disekitarnya. Hal ini terlihat dari berkurangnya ancaman terhadap kerusakan terumbu karang akibat jangkar dan ditemukannya berbagai spesies ikan-ikan karang yang berada di sekitar lokasi pelampung penambat yang dibenamkan di dasar (pantai) laut.

Pelampung penambat yang dibangun bertahan 3-4 tahun dan kemudian memerlukan penggantian. Hingga kini belum ada ketertarikan pihak lain untuk mensponsori pemasangan selanjutnya, untuk itu perlu adanya dukungan lanjutan dari pihak lain (terutama PemKot Sabang). Pengadaan pelampung penambat secara tidak langsung ikut mengamankan keberadaan Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh dan memelihara sumberdaya perikanan di sekitarnya.

Inisiatif LSM lokal ACC dalam melakukan rehabilitasi terumbu karang yang rusak (melalui transplantasi) telah memperlihatkan hasil yang menjanjikan. Ke depan upaya-upaya semacam ini perlu ditingkatkan dan bahkan diperluas jangkauannya agar memperlihatkan hasil yang optimal. Untuk itu diperlukan adanya dukungan pendanaan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Sabang atau Pemerintah Propinsi NAD.

Selain membuat Pelampung Penambat, proyek GC juga telah mendanai sebuah LSM lokal (Yayasan Peduli Sabang) untuk bersama masyarakat melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove di bagian pesisir Pinueng Cabeng, Kelurahan Iboih. Mangrove di lokasi ini rusak terhantam tsunami, tapi matinya mangrove di lokasi ini juga di disebabkan oleh terangkatnya bagian daratan pesisir dari Iboih; akibatnya banyak vegetasi mangrove di kawasan ini mati kekeringan. Mangrove yang mati tersebut kini tertinggal akar-akarnya dan menghambat persebaran benih alami mangrove dari tempat lain untuk tumbuh di lokasi ini. Untuk membantu menghijaukan kembali kawasan ini, YPS bersama masyarakat setempat telah melakukan penanaman 50.000 bibit mangrove dan merawat tanaman-tanaman tersebut.

Sebagai kompensasi dari penanaman, setiap masyarakat yang terlibat mendapatkan modal usaha. Pada umumnya modal usaha tersebut digunakan untuk melengkapi peralatan melaut dan mengembangkan usaha pertanian. Kegiatan ini berjalan lancar, bahkan sebagian dari mereka melakukan aktivitas pencarian ikan dan kepiting pada malam hari. Hal tersebut memberikan dampak kenaikan penghasilan harian bagi nelayan.

Hasil Pembelajaran:

Vegetasi mangrove yang ditanam oleh YPS dan masyarakat kini telah tumbuh dengan baik disela-sela akar bakau yang mati. Pada lokasi vegetasi ini kini telah muncul berbagai jenis kepiting dan moluska serta telah mengundang kemunculan beberapa jenis burung-burung air. Bahkan pada beberapa lokasi di dekatnya (meskipun masih sangat jarang) mulai bermunculan benih-benih vegetasi mangrove secara alami. Diharapkan dalam 2 sampai 5 tahun ke depan ekosistem mangrove akan terbentuk kembali dan menciptakan ruang bagi perkembangan keanekaragaman hayati.



Lokasi penempatan *mouring buoys* (lingkaran kuning) dan papan pengumuman di Selat Rubiah




Vegetasi mangrove tumbuh di sela-sela perakaran bakau yang mati

Informasi lebih lanjut mengenai Green Coast Indonesia dapat menghubungi

I Nyoman N. Suryadiputra (Project Coordinator): nyoman@wetlands.or.id - www.wetlands.or.id



Dibiayai oleh:  Oxfam